

## KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya **Rencana Kerja Revisi** Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disepakati, untuk dijadikan pedoman kerja tahunan guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Rencana Kerja Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2017, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Revisi Tahun 2019 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2019. Rencana Kerja (*Performance Plan*) 2019 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Provinsi Jambi*. Disisi lain capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2019 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2019.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas Dinas Kehutanan tahun 2019.

Jambi, 2018

**KEPALA DINAS**

**AKHMAD BESTARI, SH. MH**  
Pembina Tk. I  
NIP : 19740508 1999031 004

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		
1. Latar Belakang	.....	1
2. Landasan Hukum	.....	2
3. Maksud dan Tujuan	.....	4
4. Sistematika Penulisan	.....	5
<b>BAB II : EVALUASI KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI 2016</b>		
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017	.....	8
2. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	33
3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	34
4. Rancangan Awal RKPD	.....	35
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>		
1. Telaahan Terhadap Kebijakan	.....	38
2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	40
3. Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019	.....	44
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	.....	62
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan instansi daerah Provinsi Jambi yang mengurus bidang kehutanan. Potensi sumber daya hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat vital untuk dipertahankan keberadaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian. Secara garis besar hutan mempunyai fungsi ekologi, fungsi produksi dan fungsi sosial. Agar memperoleh manfaat dari fungsi tersebut, hutan harus dikelola dengan arif dan bijaksana.

Semakin disadari bahwa kelestarian sumber daya hutan merupakan aset dan modal dasar bagi pembangunan Provinsi Jambi. Lebih jauh bahwa upaya pelestarian sumber daya hutan bukanlah hanya demi kelestarian hutan atau alam itu sendiri, namun hakekatnya adalah untuk kelangsungan pembangunan bangsa dan kesejahteraan manusia. Melihat kecenderungan global dengan berbagai isu strategis baik pada tataran lokal, nasional bahkan internasional bahwa keberadaan hutan dengan berbagai aspeknya pada masa yang akan datang tetap merupakan suatu pilihan.

Seirama dengan adanya pergeseran strategi pembangunan Kehutanan dari *conventional forestry* menuju *Forest Resource and community based Management*. Mepedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Provinsi Jambi* telah menempatkan program optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lingkungan dan rendah karbon dalam mendukung dan menggerakkan perekonomian daerah.

Jambi sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi alam dengan panorama yang indah dan unik serta kelengkapan diversitas potensi alam juga melengkapi khasanah alam Jambi dengan semboyan “*Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*”. Namun khasanah sumberdaya hutan di Provinsi Jambi tentunya menyimpan tantangan pada berbagai tahapan pengelolaannya. Keadaan ini tentunya perlu disikapi secara bijaksana sehingga upaya untuk mencapai kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu kenyataan. Permasalahan dan dinamika dalam suatu pengelolaan hutan hendaknya menghantarkan pada suatu kesadaran dan penyadaran tentang pentingnya kelestarian sumberdaya hutan.

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 adalah  $\pm 2.098.535,00$  Ha atau  $\pm 42,98$  % dari luas daratan di Provinsi Jambi.

Pembagian kawasan hutan di Provinsi Jambi terdiri dari :

a.	Hutan Produksi Terbatas	$\pm 258.285,00$ Ha
b.	Hutan Produksi Tetap	$\pm 963.792,00$ Ha
c.	Hutan Produksi Konversi	$\pm 11.399,00$ Ha
d.	Hutan Lindung	$\pm 179.588,00$ Ha
e.	Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam	$\pm 685.471,00$ Ha

## 2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019
- i. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPB).
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- q. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019.
- c. Penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021

#### **4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021

###### **2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

###### **3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan Renja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

###### **4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta susunan garis besar isi Renja.

##### **BAB II EVALUASI KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2017**

###### **1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2017**

Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

## 4. Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap rancangan awal RKPD,

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap kebijakan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi  
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
3. Program dan Kegiatan Tahun 2018  
Berisikan penjelasan mengenai :
  - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala dinas, pencapaian penurunan hotspot dan luas tutupan pohon untuk menunjang program penurunan gas rumah kaca.
  - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan dan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

#### BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari kegiatan tahun 2017 untuk perbaikan tahun 2019.

## BAB II

### EVALUASI KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2017 telah melaksanakan **38 kegiatan** dalam **9 Program** untuk memenuhi Kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi. Terhadap masing-masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

##### I. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

**Program pemberdayaan sumber daya hutan memiliki 6 (Enam) kegiatan bertujuan agar mengoptimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.028.968.883,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Realisasi Rp. 990.093.153,- atau sebesar 96,34 % sedangkan realisasi fisik 96.38 %.**

1. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan KPHL. Jumlah anggaran Rp. 147.140.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 144.116.000,- ,Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud teridentifikasi data dan solusi penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Tersosialisasinya batas kawasan hutan di 4 kabupaten
- b. Pelaksanaan konsultasi baik ke pusat maupun ke daerah

2. Pengembangan Hutan tanaman

Jumlah anggaran Rp. 133.108.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 132.343.000,- ,Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terkendalinya pengelolaan hutan Restorasi (RE), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsultasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Realisasi 2 RE, 2 Hutan Alam, 13 HTR, 3HKm dan 4 HTI

3. Pengembangan hasil hutan non kayu

Jumlah anggaran Rp. 142.108.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 141.404.350,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terkelolanya hasil hutan non kayu dan terlaksananya Monev anggrek alam.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Terlaksananya Monev HHBK di 5 Kabupaten
- d. Sosialisasi ijin pemungutan HHBK di Batanghari (1 ijin) dan Sarolangun (6 Ijin).
- e. Monev anggrek di kabupaten Kerinci dan Merangin.

4. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial

Jumlah anggaran Rp. 143.607.140,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 138.993.440,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terkumpulnya data dan fasilitasi hutan desa di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Pembinaan dan fasilitasi di 14 Hutan Desa yaitu Desa Lubuk Bedorong, Temalang, Napal Melintang, Batin Mengambang, Tambak Ratu, Muaro Air Duo, Muaro Madras, Tanjung Dalam, Kampung Sangi - Letung Dusun Buat, Dusun Lamang Panjang, Dusun Sungai Talang, Dusun Lubuk Beringin, Dusun Senamat Ulu dan Desa Koto Kandis Dendang
- d. Tata batas di 5 Hutan desa (Desa Hajran, Jelutih, Olak Besar, Sinar Wajo dan Sungai Buras)

5. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

Jumlah anggaran Rp. 143.607.140,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 139.993.440,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpantaunya bahan baku dan produksi Industri Primer Hasil Hutan di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Terpantaunya bahan baku dan produksi industri primer Hasil Hutan di 15 UIPHHK di Kab. Muaro Jambi, Tebo, Bungo, sarolangun
- d. Terpantaunya peredaran hasil hutan di 9 kabupaten 1 Kota
- e. Realisasi PSDH = 95,26 % (Rp.24.155.191.561,48),  
DR = 96,67 % (Rp. 7.904.697.384,95)

6. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Jumlah anggaran Rp. 319.398.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 293.242.919,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpantaunya peredaran hasil hasil hutan, sosialisasi peraturan bidang kehutanan dan terpungutnya kehutanan

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Terpantaunya peredaran hasil hutan di 3 kabupaten (Muaro Jambi, Tebo dan Bungo).
- d. Terpungutnya penerimaan kehutanan di 1 HPH dan 17 HTI (PT. Tebo Multi Agro, PT. Jebus Maju,PT. Wanakasita Nusantara,PT. Wanamukti Wisesa,PT. Limbah Kayu Utama,PT. Samhutani,PT. Arangan Hutan Lestari,PT. Alam Lestari Nusantara,PT Agronusa Alam Sejahtera,PT. Malaka Agro Perkasa,PT. Mugitriman,PT. Lestari Asri Jaya,PT. Wira Karya Sakti,PT. Rimba Hutani Mas,PT. Putra Duta Indah Wood)

## II. Program Rehabilitasi hutan dan Lahan

Program ini memiliki 3 (Tiga) kegiatan pendukung dengan total dana sebesar Rp 1.490.769.994,00. melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan secara optimal dan lestari, sehingga dapat meningkatnya tutupan lahan dan terjaganya kawasan hutan dari perambahan/illegal logging. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.333.406.006,00 atau sebesar 89,44 %, sedangkan fisik 88,27 %.

1. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata  
Jumlah anggaran Rp. 708.532.100,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 565.563.012,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpeliharanya sarana dan prasarana TAHURA sekitar Tanjung.  
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :
  - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
  - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
  - c. Terlaksananya penanaman seluas 4 Ha di KPHP Sarolangun hulu dan 4 Ha di KPHP Tanjung Jabung Barat dan 4 Ha di KPHP Merangin.
  
2. Pemeliharaan Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata  
Jumlah anggaran Rp. 577.333.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 572.999.000,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpeliharanya sarana dan prasarana Kebun Raya Bukit Sari dan Taman Hutan Kota.  
Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :
  - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
  - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
  - c. Terlaksananya pemeliharaan 10 ha THK dan 435 ha KRBS dan arboreteum 12 di KPHP unit I Kerinci
  - d. Penerimaan PAD dari Tiket masuk di Taman Hutan Kenali sebesar Rp. 105.850.000,-

3. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran Rp. 204.904.894,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 194.843.794,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpeliharanya tanaman arboretum dan Tanaman Unggulan Lokal (TUL).

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Terlaksananya pemeliharaan arboreteum 12 Ha di KPHP unit I Kerinci dan KPHL Bram Hitam
- d. Pengendalian RHL di 9 kabupaten 2 kota

### **III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**

**Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan memiliki 5 (lima) kegiatan bertujuan agar mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 1.508.070.100,00 melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Realisasi Rp. 1.308.820.756,00 atau sebesar 86,79 %, sedangkan realisasi fisik 87,42 %.**

1. Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 634.808.100,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 483.275.234,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang bebas asap dan menurunkannya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 :

- a. 10 kali Sosialisasi sebanyak 10 kali di Kab. Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Merangin, Sarolangun, Kerinci, Bungo, Tebo dan Kota sungai Penuh
- b. Terlaksananya sosialisasi 8 kali ke 5 kabupaten (Tanjabtim, tanjabbar, Muaro Jambi, Kerinci dan Merangin)
- c. Pengecekan Hotspot 2 kali (Muaro Jambi dan Tanjab Barat)
- d. Pemadaman karhutla 18 kali di Tanjab Timur 1 kali, Sarolangun 6 kali, Tebo 4 kali, Bungo 1 kali dan Kerinci 6 kali

2. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusahaan hutan  
Dari jumlah anggaran Rp. 246.334.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 229.251.994,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terlaksananya penyuluhan kehutanan dalam mendukung kebijakan pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan sumber daya hutan..

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Sosialisasi Permen LHK P. 32/2016, 8 kali (Bungo, Tanjab Timur, Merangin dan Kerinci)

3. Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

Dari anggaran sebesar Rp. 351.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 328.728.099,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terwujudnya kawasan hutan yang bebas perambahan dan tertibnya peredaran hasil hutan di Provinsi Jambi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Monev Regu Karhutla di 10 ijin (HTI/HA/RE)
- d. Patroli Pencegahan 4 kali (Muaro Jambi, Tanjab Timur, Batanghari dan Tebo)
- e. 15 kali operasi pengamanan, Muaro Jambi = 8 kali, Tanjab Timur = 2 kali, Tanjab Barat = 3 kali, Tebo = 2 kali dan Bungo = 1 kali
- f. 8 kali koordinasi, 3 kali Tanjab Timur, 1 kali Merangin, 1 kali Batanghari, 1 kali Bungo, 1 kali Tebo dan 1 kali Kerinci

4. Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Dari anggaran sebesar Rp. 96.950.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 92.128.729,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar tertibnya pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan diluar kehutanan.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi

- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
  - c. Evaluasi pada 5 Pemegang ijin IPKKH, PT. Petrochina 3 Ijin dan 2 ijin lainnya
5. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan
- Dari anggaran sebesar Rp. 178.478.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 175.436.700,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terdata dan terfasilitasinya masalah konflik kepemilikan lahan di Provinsi Jambi.
- Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 yaitu :
- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
  - b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
  - c. Monitoring Pasca Mou ke 9 kabupaten
    - Tebo Lokasi PT. Lestari Alam Jaya, PT. Alam Bukit Tigapuluh, PT. Arangan Hutan Lestari, PT. Tebo Multi Agro dan HP Tabir Kejasung
    - Tanjab Barat Lokasi PT. Wira Karya Sakti
    - Sarolangun lokasi PT. Samhutani dan PT Agronusa Alam Sejahtera
    - Bungo lokasi PT. Malaka Agro Perkasa dan Hutan Adat
    - Kerinci Lokasi Hutan adat
    - Tanjab Timur lokasi Taman Nasional Berbak
    - Merangin Lokasi Hutan adat
    - Muaro Jambi Lokasi PT. Wira Karya Sakti

#### **IV. Program Perencanaan dan Pengembangan**

**Program Perencanaan dan Pengembangan memiliki 3 (tiga) kegiatan bertujuan agar terbentuknya hutan desa, kelompok hutan kemasyarakatan dan kelompok pendamping di Provinsi Jambi. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 769.313.000,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Realisasi Rp. 676.994.773,- atau sebesar 88,00 %, sedangkan fisiknya 93,71 %.**

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPHP/KPHL
- Jumlah anggaran sebesar Rp. 95.813.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 89.577.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terencananya kegiatan di KPHP/KPHL di Provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Terbuatnya 1 peta dan 1 dokumen

2. Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 447.199.773,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terbentuknya hutan desa dan hutan kemasyarakatan di provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi baik ke pusat maupun ke daerah
- c. Identifikasi desa didalam kawasan hutan di 9 kabupaten
  - Kab. Sarolangun : Desa Taman Bandung, Butang, Napal Melintang, Berkun, Sikamis dan Lubuk bedorong
  - Kab. Merangin : DesaPtekun, Air Liki, Air Liki Baru, Koto Rawang, Tanjung kasri dan Renah Kemumu
  - Kab. Tebo : Desa Sungai Karang, Aur Cino, Teluk Kayu Putih, Tanjung Pucuk Jambi ,Lubuk Maderasah, Lancar Tiang dan Talang Mamak
  - Kab. Tanjab Barat : Desa sungai Paur, Bukit Bakar, Muaro Danau, Terjun Gajah, Teluk Kulbi, Lubuk Terentang, sungai Terap, Penoban, Simpang Rambutan, Awang Kempas, Nipa Panjang, Sungai Toman, Bukit Tempurung, bhakti Idaman dan Kel. Simpang
  - Kab. Tanjab Timur : Desa Muntiano, Sri Menanti, Sungai Beras, Sinar Wajo,Simpang Tuan, Mencolok dan Pematang rahim
  - Kab. Kerinci : Desa Muara Emat, masgo, Sungai Bendung Air, Ranah Kayu Embun, Sungai Kuning, Lubuk tabun, Pasir jaya, Suko pangkat, Sungai Betung Mudik, Sungai Renah dan Danau Tinggi
  - Kab. Muaro Jambi : Desa Suko Awin jaya, Suak Putat, Bukit Baling, Tanjung Lanjut, Sungai Gelam, Tanjung katung, Rukam, Manis mato, Sekumbung dan lubuk Raman
  - Kab. Batanghari : Desa Kuap, Bukit Sari, Danau Bangko, Blanti Jaya, Batu Sawar, Jelutih, Aro,Bungku, kaos dan Tanjung lanjut

3. Akses Layanan informasi pemasaran hasil hutan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 173.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 140.218.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terbentuknya hutan desa dan hutan kemasyarakatan di provinsi Jambi.

Realisasi kegiatan ini selama tahun 2017 :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan pameran di Aceh 1 kali

**V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 6.800.000,- atau 45,33 %, dengan realisasi fisik sebesar 45,50 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya kelancaran dalam surat menyurat. Realisasi kegiatan berupa belanja perangko, materai dan paket pengiriman.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 600.900.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 325.559.353,- atau 58,18 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik sehingga tercipta kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Realisasi kegiatan berupa belanja telepon, air dan listrik.

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.080.000,- atau 17,33 %, dengan realisasi fisik sebesar 25,00 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tercipta kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Realisasi kegiatan berupa belanja bahan bakar minyak/ gas.

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.  
Jumlah anggaran sebesar Rp. 323.852.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 313.482.000,- atau 96,80 %, dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya administrasi keuangan dengan baik. Realisasi kegiatan berupa pembayaran honor panitia kegiatan, honor tim pengadaan barang dan jasa, honor pegawai non PNS.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.  
Jumlah anggaran sebesar Rp. 202.700.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 202.700.000,- atau 99,99 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terciptanya suasana kerja yang bersih dan nyaman dan dilaksanakan oleh pihak ke-3 (rekanan).
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.  
Jumlah anggaran sebesar Rp. 242.748.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 113.104.000,- atau 46,59 %, dengan realisasi fisik sebesar 50,00 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya alat tulis kantor. Realisasi kegiatan berupa pembelian alat tulis kantor.
7. Penyediaan Cetak dan Penggandaan.  
Jumlah anggaran sebesar Rp. 64.074.000,00 yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 63.063.000,- atau 98,37 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Realisasi kegiatan berupa belanja cetak dan penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor.  
Jumlah anggaran sebesar Rp. 26.330.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 20.106.000,- atau 76.36 %, dengan realisasi fisik sebesar 80 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan

maksud tersedianya peralatan dan instalasi listrik kantor. Realisasi kegiatan berupa belanja alat listrik dan elektronik.

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 31.068.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 28.440.700,- atau 91,54 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi kegiatan berupa biaya publikasi, belanja modal peralatan kantor, peralatan dapur, penghias ruangan, kembang hiasan dan pot bunga.

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 19.160.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 10.220.000,- atau 53,34 %, dengan realisasi fisik sebesar 65 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya bahan bacaan. Realisasi belanja surat kabar/ majalah.

11. Penyediaan Makan dan Minum Rapat.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 41.300.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 28.299.500,- atau 68,52 %, dengan realisasi fisik sebesar 85 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dengan maksud tersedianya makan dan minum rapat. Realisasi belanja makan dan minum rapat.

12. Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 820.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 798.556.389,- atau 97,38 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Realisasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

## **VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

### **1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 142.283.300,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 128.008.300,- atau 89,97 %, dengan realisasi fisik sebesar 98 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor. Realisasi belanja modal perlengkapan gedung kantor.

### **2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 49.900.000.00 atau 99,80 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud tersedianya gedung kantor yang baik. Realisasi belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan belanja kontruksi lainnya.

### **3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 647.800.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 450.532.141,- atau 69,55 %, dengan realisasi fisik sebesar 75 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terpeliharanya kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas. Realisasi belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan pelumas serta belanja surat tanda nomor kendaraan.

### **4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 60.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 42.101.650,- atau 69,63 %, dengan realisasi fisik sebesar 75 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud peralatan gedung kantor terpelihara dan semakin baik. Realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

## **VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

### **1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 212.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 212.000.000,- atau 100 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan

maksud terciptanya keseragaman dalam berpakaian. Realisasi pembelian pakaian dinas PNS berupa PSH.

#### **VIII. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 114.500.000,00 yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 38.315.602,- atau 33,46 %, dengan realisasi fisik sebesar 50 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan maksud terwujudnya peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai. Realisasi belanja pelatihan dan keterampilan PNS.

#### **IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah anggaran sebesar Rp. 193.235.300,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 184.212.233,- atau 95,33 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya penyusunan laporan keuangan berupa RKA, RKA-P, LKPJ, LKP dan laporan keuangan lainnya.

2. Monitoring dan evaluasi pelaporan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 153.676.122,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 121.991.118,- atau 79,38 %, dengan realisasi fisik sebesar 85 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya monitoring kegiatan bidang kehutanan di 11 KPHP/KPHL di Provinsi Jambi.

3. Pemantapan dan evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP – RAD GRK)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 111.186.808,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 96.154.258,- atau 93,07 %, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya monitoring kegiatan PEP RAD-GRK Provinsi Jambi di 11 KPHP/KPHL dengan output berupa 1 (satu) buku PEP RAD-GRK Provinsi Jambi Tahun 2017 bidang kehutanan.



**TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2017**

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Kinerja Kegiatan		Kinerja Program
			Keuangan	Fisik ( % )	Output	Outcome	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,399,133,606</b>	<b>1,912,383,446</b>	<b>79.71</b>	terlayannya administrasi perkantoran terpenuhi	Ketersedian pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	15,000,000	6,800,000	45.33	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Terciptanya kelancaran dalam surat menyurat	surat menyurat 10000 surat
2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	600,900,000	325,559,353	58.18	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Pembayarannya rekening listrik, air dan telpon selama 12 bln
3	Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12,000,000	2,080,000	17.33	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	penyediaan peralatan kantor, korden, kursi, print
4	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	323,852,000	313,482,000	96.80	Tersedianya anggaran dalam administrasi keuangan Dishut	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	tertibnya keuangan selama 12 bln
5	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	202,700,000	202,672,500	99.99	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Terciptanya suasana kerja yang bersih dan nyaman	bersihnya ruangan kantor selama 12 bln, di pihak ke 3 kan

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	242,748,800	113,104,000	46.59	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi Kantor Dishut	terpenuhinya kebutuhan kantor (ATK) selama 12 bln
7	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64,074,000	63,063,000	98.42	Tersedianya barang cetakan beserta penggandaan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	tercetaknya laporan - laporan selama 12 bln
8	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26,330,000	20,106,000	76.36	Tersedianya peralatan dan instalasi listrik kantor	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Peralatan listrik tersedia selama 12 bln
9	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31,068,800	28,440,700	91.54	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Perlengkapan kantor dipenuhi
10	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19,160,000	10,220,000	53.34	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi tentang peraturan perundang-undangan terlaksananya pelayanan penyediaan peraturan perundang-undangan	langganan koran lokal selama 12 bln
11	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	41,300,000	28,299,500	68.52	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Tercapainya tujuan rapat dan meningkatnya kinerja pegawai	makanan dan minuman untuk tamu selama 12 bln

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	820,000,000	798,556,389	97.38	Tersedianya fasilitas tugas kedinasan	Tercapainya tujuan rapat koordinasi dan konsultasi dinas	Koordinasinya kegiatan dinas kehutanan baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>900,583,300</b>	<b>670,542,091</b>	<b>74.46</b>	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Pembelian dan pemeliharaan alat-alat kantor
1	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	142,283,300	128,008,300	89.97	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya perlengkapan kantor	pembelian alat -alat kantor
2	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	49,900,000	99.80	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Terwujudnya pelayanan perkantoran dengan baik	pemeliharaan gedung kantor selama 12 bln
3	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	647,800,000	450,532,141	69.55	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pelayanan perkantoran dengan baik	pemeliharaan kendaraan bermotor selama 12 bln
4	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60,500,000	42,101,650	69.63	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pelayanan perkantoran dengan baik	pemeliharaan peralatan/gedung selama 12 bln
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>212,000,000</b>	<b>212,000,000</b>	<b>100</b>	<b>Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>Terciptanya keseragaman dalam berpakaian</b>	<b>Pengadaan pakaian dinas Pegawai</b>
1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	212,000,000	212,000,000	100	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya keseragaman dalam berpakaian	pembuatan pakaian dinas sebanyak 530 orang

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>114,500,000</b>	<b>38,315,602</b>	<b>33.46</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	<b>Pegawai yang profesional</b>	<b>Meningkatnya keterampilan dan Kapasitas SDM Pegawai</b>
1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	114,500,000	38,315,602	33.46	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Terwujudnya peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai	pelatihan untuk apatur di dinas provinsi Jambi
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>458,098,230</b>	<b>402,357,609</b>				Meningkatnya keterampilan dan Kapasitas SDM Pegawai
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	193,235,300	184,212,233	95.33	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dinas Kehutanan	RKA, RKA-P, LKPJ, LKP, dan laporan keuangan lainnya
2	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	153,676,122	121,991,118	79.38	Terlaksananya monitoring kegiatan bidang kehutanan di KPHP provinsi Jambi	Terkumpulnya data-data kegiatan bidang kehutanan	11 KPHP di Provinsi Jambi
3	Kegiatan Pemantapan dan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)	111,186,808	96,154,258	86.48	Terlaksananya pelaporan untuk PEP RAD GRK bidang kehutanan	Terwujudnya penyusunan laporan PEP RAD GRK	buku PEP RAD GRK bidang Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2017

1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan</b>	<b>1,027,469,746</b>	<b>992,504,067</b>	<b>96.60</b>			Pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaanya
1	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan KPHL	147,140,400	144,116,000	95.14	Terlaksananya Sosialisasi -	4 Kabupaten	4 kabupaten Tebo, Bungo, Tanjab Barat, Sarolangun
2	Pengembangan Hutan Tanaman	133,108,000	132,343,000	100	Terkendalinya - pengelolaan RE, HTI dan HTR	- 1 RE, 18 HTI dan HTR	Realisasi 2 RE (Reki dan ABT), 2 Hutan Alam (PT. Putra Duta Indah Wood dan PT. Pesona Belantara), 13 HTR, 3 Hkm dan 4 HTI
3	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	142,108,000	141,404,350	99.43	Terkelolanya Hasil Hutan - Non Kayu	- 85%	Monev HHBK di 5 Kabupaten ( Kerinci, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Barat dan Tebo) dan sosialisasi ijin pemungutan HHBK di Batanghari (1 ijin) dan Sarolangun (6 ijin)
					Terkelolanya - persemaian rotan	- 1 Persemaian	-
					- Terlaksananya Persemaian Bibit Rotan dan jenis Anggrek Alam/Spesies	- 5 Jenis	Monev Potensi anggrek di Kab. Kerinci dan Merangin serta pemeliharaan rumah anggrek.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial	142,108,000.00	141,404,350.00	100	Terlaksannya pembinaan dan Fasilitas Hutan Desa	- 10 Hutan Desa	Pembinaan dan fasilitas di 14 Hutan Desa yaitu Desa Lubuk Bedorong, Temalang, Napal Melintang, Batin Mengambang, Tambak Ratu, Muaro Air Duo, Muaro Madras, Tanjung Dalam, Kampung Sangi - Letung Dusun Buat, Dusun Lamang Panjang, Dusun Sungai Talang, Dusun Lubuk Beringin, Dusun Senamat Ulu dan Desa Koto Kandis Dendang
					- Terealisasinya tata batas hutan desa	- 5 Hutan Desa	Tata batas di 5 Hutan desa (Desa Hajran, Jelutih, Olak Besar, Sinar Wajo dan Sungai Buras)
					- Laporan Tahunan Hutan Desa	- 1 Laporan	1 Laporan
5	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	143,607,140.00	139,993,440.00	96.79	Terpantaunya bahan baku dan produksi industri primer Hasil Hutan	- 15 IUPHHK	15 IUPHHK
					- Termonitornya RPBB	- 8 IUPHHK	8 IUPHHK
					- Termonitornya Produksi di 6 HTI/HA	- 6 HTI/HA	6 HTI
					- Terpantaunya harga pasar hasil hutan di 6 Kabupaten	- 6 Kabupaten	6 Kabupaten
6	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	319,398,200.00	293,242,919.00	92.42	Terpantaunya peredaran hasil hutan	- 12 IUPHHK, 4 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak	9 kabupaten 1 Kota
					- Terfasilitasinya Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari	- 5 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak	9 kabupaten 1 Kota

1	2	3	4	5	6	7	8
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpungutnya Pendapatan Negara dari Sektor Kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % dari target</li> </ul>	PSDH = 95,26 % (Rp. 24.155.191.561,48), DR = 96,67 % (Rp. 7.904.697.384,95) ,
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan di Bidang Kehutanan kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat Pemilik Hutan Hak/Kayu Rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kali</li> </ul>	1 kali
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpungutnya penerimaan Kehutanan Tahun 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Hutan Alam dan 8 HTI</li> </ul>	PT Wanakasita Nusantara, Samhutani, Rimba hutani Mas, Agronusa Alam Sejahtera, REKI, Wana Perintis, Wirakarya Sakti, Lestari Asri Jaya, Pesona Belantara Persada, Putra Duta Indah Wood, Alam Bukit Tiga Puluh dan Hijau Artha Nusa
<b>II</b>	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>1,490,769,909</b>	<b>1,333,405,810</b>	<b>89.44</b>			Berkurangnya lahan kritis di provinsi Jambi
1	Kegiatan Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	708,532,012.00	565,563,012.00	92.42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjaga dan terpeliharanya TAHURA Sekitar Tanjung dan penanaman tanaman kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 bln</li> </ul>	- 12 bln
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman Tanaman kehutanan di KPHP/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RHL seluas 20 Ha</li> </ul>	RHL seluas 12 di KPHP Sarolangun, Kerinci dan Tanjung Jabung Barat
2	Kegiatan Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	577,333,000.00	572,999,000.00	99.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpeliharanya dan terlindunginya THK dan KRBS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Ha THK, 435 Ha KRBS</li> </ul>	10 Ha Taan Hutan Kenali di Kota Jambi dan KBRS seluas 435 Ha di Kab. Tebo
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Fasilitas Rekreasi dan Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80%</li> </ul>	80% (Kota Jambi dan Tebo)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan yang berkualitas dan koleksi Tumbuhan dataran Rendah Sumatera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibit berkualitas</li> </ul>	Bibit berkualitas
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya Peningkatan PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% (Rp. 100.000.000)</li> </ul>	105% (Rp. 105.850.000)

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kegiatan Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	204,904,894.00	194,843,794.00	95.09	- Terpeliharanya Arboretum dan Tanaman Unggulan Lokal	- 22 Ha	12 Ha Arboreteum di Sungai Gela dan 10 Ha di Kerinci
					- Terwujudnya pengendalian pengelolaan KPHL	- 1 Unit	KPHL Bram Hitam
					- Terwujudnya pengendalian rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH	- 43 izin	7 Izin IPPKH di kab. Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung timur
					- Terwujudnya pengendalian RHL	- 9 Kabupaten dan 2 kota	9 kabupaten 2 kota
<b>III</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>	<b>1,517,070,106</b>	<b>1,308,698,764</b>	86.264884			Tercapainya kelestarian potensi Sumber daya hutan
1	Pengendalian dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	643,808,100.00	483,278,234.00	76.13	Terlaksananya	- 25 kali	- 10 kali Sosialisasi (Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Merangin, Sarolangun, Kerinci, Bungo, Tebo dan Kota sungai Penuh) - Sosialisasi Permen LHK P. 32/2016, 8 kali (Bungo, Tanjab Timur, Merangin dan Kerinci) - Monev Regu Karhutla di 10 ijin (HTI/HA/RE) - Patroli Pencegahan 4 kali (Muaro Jambi, Tanjab Timur, Batanghari dan Tebo) - Pengecekan Hotspot 2 kali (Muaro Jambi dan Tanjab Barat)
					- Pencegahan kebakaran lahan dan hutan		
					Terlaksananya operasional pemadaman kebakaran lahan dan hutan	- 10 kali	- Pemadaman karhutla 18 kali di Tanjab Timur 1 kali, Sarolangun 6 kali, Tebo 4 kali, Bungo 1 kali dan Kerinci 6 kali

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan	246,334,000.00	229,251,994.00	76.13	Terlaksananya - penyuluhan kehutanan dalam mendukung kebijakan pembangunan kehutanan	- 15 kali	15 Kali, dengan rincian Bungo 3 kali, Merangin 2 kali, Tebo 2 kali, Batanghari 2 kali, Muaro Jambi 2 kali dan Tanjab Barat 2
					Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan multifungsi dan manfaat sumber daya hutan	- 350 Orang	350 orang dengan rincian Bungo = 100 Orang , Merangin = 50 orang, Tebo 2 = 50 orang, Batanghari = 50 orang, Muaro Jambi = 50 orang dan Tanjab Barat = 50 orang
3	Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan	351,500,000.00	328,728,099.00	93.52	Terlaksananya Operasi - pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	- 10 kali	15 kali operasi pengamanan, Muaro Jambi = 8 kali, Tanjab Timur = 2 kali, Tanjab Barat = 3 kali, Tebo = 2 kali dan Bungo = 1 kali
					Terlaksananya - koordinasi pengamanan hutan	- 15 kali dalam daerah, 10 kali luar daerah	8 kali koordinasi, 3 kali Tanjab Timur, 1 kali Merangin, 1 kali Batanghari, 1 kali Bungo, 1 kali Tebo dan 1 kali Kerinci
					Terlaksananya pengawasan - penggunaan senjata api POLHUT	- 3 kali	2 kali
					Terlaksananya - penjagaan/pengamanan gudang barang bukti	- 12 Bulan	12 bulan
					Terlaksananya rapat - koordinasi pengamanan hutan	- 3 kali	2 kali
4	Evaluasi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	96,950,000.00	92,128,729.00	100	Terlaksananya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam secara baik sehingga dapat terkendalinya perizinan dalam kawasan hutan -	- 3 Pemegang ijin	Evaluasi pada 5 Pemegang ijin IPKKH, PT. Petrochina 3 Ijin dan 2 ijin lainnya

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan	178,478,000.00	175,311,700.00	98.23	<p>Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara baik sehingga dapat terkendalinya konflik dalam kawasan hutan</p>	- 9 Kabupaten	<p>Monitiring Pasca Mou ke 9 kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batanghari Lokasi PT. REKI, PT. Wana Perintis</li> <li>- Tebo Lokasi PT. Lestari Alam Jaya, PT. Aalam Bukit Tigapuluh, PT. Arangan Hutan Lestari, PT. Tebo Multi Agro dan HP Tabir Kejasung</li> <li>- Tanjab Barat Lokasi PT. Wira Karya Sakti</li> <li>- Sarolangun lokasi PT. Samhutani dan PT Agronusa Alam Sejahtera</li> <li>- Bungo lokasi PT. Malaka Agro Perkasa dan Hutan Adat</li> <li>- Kerinci Lokasi Hutan adat</li> <li>- Tanjab Timur lokasi Taman Nasional Berbak</li> <li>- Merangin Lokasi Hutan adat</li> <li>- Muaro Jambi Lokasi PT. Wira Karya Sakti</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan</b>	<b>769,313,003</b>	<b>651,376,177</b>	<b>84.67</b>			
1	Perencanaan kegiatan Pengelolaan KPHP/KPHL	95,813,000.00	89,577,000.00	94.72	<p>Jumlah pata informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan</p> <p>Jumlah dokumen rencana kehutanan tingkat provinsi</p>	<p>- 1 peta</p> <p>- 1 Dokumen</p>	<p>1 Peta</p> <p>1 Dokumen</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penelitian Terpadu terhadap usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	500,000,000.00	447,199,173.00	100	Jumlah dokumen inventarisasi dan identifikasi desa yang masuk dalam kawasan hutan	- 9 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Sarolangun : Desa Taman Bandung, Butang, Napal Melintang, Berkun, Sikamis dan Lubuk bedorong</li> <li>- Kab. Merangin : DesaPtekun, Air Liki, Air Liki Baru, Koto Rawang, Tanjung kasri dan Renah Kemumu</li> <li>- Kab. Tebo : Desa Sungai Karang, Aur Cino, Teluk Kayu Putih, Tanjung Pucuk Jambi ,Lubuk Maderasah, Lancar Tiang dan Talang Mamak</li> <li>- Kab. Tanjab Barat : Desa sungai Paur, Bukit Bakar, Muaro Danau, Terjun Gajah, Teluk Kulbi, Lubuk Terentang, sungai Terap, Penoban, Simpang Rambutan, Awang Kempas, Nipa Panjang, Sungai Toman, Bukit Tempurung, bhakti Idaman dan Kel. Simpang</li> <li>- Kab. Tanjab Timur : Desa Muntiano, Sri Menanti, Sungai Beras, Sinar Wajo,Simpang Tuan, Mencolok dan Pematang rahim</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kerinci : Desa Muara Emat, masgo, Sungai Bendung Air, Ranah Kayu Embun, Sungai Kuning, Lubuk tabun, Pasir jaya, Suko pangkat, Sungai Betung Mudik, Sungai Renah dan Danau Tinggi</li> <li>- Kab. Muaro Jambi : Desa Suko Awin jaya, Suak Putat, Bukit Baling, Tanjung Lanjut, Sungai Gelam, Tanjung katung, Rukam, Manis mato, Sekumbang dan lubuk Raman</li> <li>- Kab. Batanghari : Desa Kuap, Bukit Sari, Danau Bangko, Blanti Jaya, Batu Sawar, Jelutih, Aro, Bungku, kaos dan Tanjung lanjut</li> </ul>
3	Akses Pelayanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	173,500,000.00	114,600,000.00	66.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pelaksanaan pameran dan update data pembangunan pada website</li> <li>- Terlaksananya informasi kehutanan dan promosi sumber daya hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 kali</li> <li>- 100%</li> </ul>	<p>1 kali mengikuti Penas di Aceh</p> <p>100%</p>



## II. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 37 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi pada Dinas-Dinas Provinsi Jambi, maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan susunan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi ;
  - Tata kesatuan pengelolaan hutan
  - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan
  - Pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan)
  - Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
  - Pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan provinsi Jambi
  - Pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi (kurang dari 6000 M<sub>3</sub> /tahun dan
  - Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.
- c. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi ,
  - Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota.
  - Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- d. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- e. Melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- f. Melaksanakan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan
- g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

### **III. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum
2. Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya
3. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisata
4. Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang Baik

Dan juga tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2016 -2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
3. Meningkatkan tata kelola kehutanan yang bersih, transparan dan akuntabel secara partisipatif
4. Tersedianya ketersediaan data goespasioal bidang kehutanan
5. Mewujudkan perlindungan kawasan hutan
6. Mewujudkan tutupan lahan dan kawasan hutan

Berdasarkan capaian prioritas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait dengan capaian prioritas ke-4 yaitu Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Hidup dengan indikator luas lahan tertutup pohon dan penurunan titik api (hotspot).

#### **IV. Rancangan RKPD**

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 untuk Dinas Kehutanan tetap mengacu pada prioritas pembangunan kehutanan sebagai berikut :

- a. Pemantapan dan Penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
- c. Restrukturisasi dan revitalisasi industri kehutanan
- d. Rehabilitasi hutan dan lahan
- e. Perlindungan hutan

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kehutanan maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2019 merencanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan capaian prioritas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan terdiri dari :
1. Pembangunan KPHP, KPHL
  2. Pengembangan hutan tanaman
  3. Pengembangan kelompok tani usaha kehutanan dan pengembangan hutan masyarakat adat
  4. Fasilitasi budidaya tanaman pangan berbasis agroforestry
  5. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial
  6. Pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu
  7. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
  8. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  9. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
  10. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
  11. Pengembangan hasil hutan non kayu
  12. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit I Kerinci
  13. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
  14. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin.
  15. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun.
  16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
  17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
  18. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
  19. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
  20. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
  21. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
-

22. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat

- b. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :
1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL
  2. Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan
  3. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
  4. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit I Kerinci
  5. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
  6. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin.
  7. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
  8. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
  9. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
  10. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
  11. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
  12. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
  13. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
  14. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :
1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  2. Monitoring sumber daya manusia dan sarana prasarana kebakaran
  3. Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
  4. Pengamanan batas kawasan hutan dan kawasan hutan
  5. Koordinasi penegakan hukum dalam rangka pemanggilan saksi tersangka/ahli serta pengurusan ijin sita pengadilankabupaten /kota
  6. Bimbingan teknis penggunaan senjata api
  7. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
  8. Pemantapan kawasan hutan
  9. Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
  10. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan
  11. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit I Kerinci

12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo.
13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
14. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
15. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
16. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
17. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
18. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
21. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat.

d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
2. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
3. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
4. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit I Kerinci
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit II dan III Bungo
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun

10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit IX Tebo Barat
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit X Tebo Timur
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam hutan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya, tidaklah terletak pada suatu sisi pandang saja, tetapi justru saling terkait mulai dari sektor hulu yaitu eksploitasi, penataan ruang dan kawasan, sosial ekonomi masyarakat, sampai ke hilir berupa akses pasar produk-produk sektor kehutanan. Keterkaitan antara sektor dan tahapan pengelolaan sumberdaya hutan menjadi suatu dasar bagi kebijakan strategis dan tidak bersifat parsial dalam pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan di Propinsi Jambi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Aspek terkait Penataan Ruang dan Kawasan* : Adanya konflik kepentingan antara sektor Kehutanan dengan non-kehutanan menjadi muara masalah penataan ruang dan kawasan yang berakibatnya berupa tumpang tindih penggunaan kawasan yang ada.
2. *Aspek pemasaran produk Kehutanan*; Kesenjangan kapasitas industri dengan kemampuan menyediakan bahan baku industri sampai pada permasalahan persaingan harga yang tidak kompetitif antara produksi yang legal dengan bentuk izin lainnya.
3. *Illegal Logging dan kebakaran hutan*; Krisis multi dimensi yang berkepanjangan berdampak pada mata pencaharian masyarakat hingga peningkatan lahan kritis akibat rusaknya kawasan hutan. Keadaan ini semakin diperparah oleh kondisi menjamurnya Industri Primer Hasil Hutan dan izin lainnya serta belum maksimalnya peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan.
4. *Kualitas Hutan yang semakin menurun*; adanya illegal logging dan kebakaran hutan merupakan faktor kuat bagi penurunan kualitas dan potensi sumberdaya hutan.
5. *Masalah kesejahteraan masyarakat sekitar hutan*; Belum tercapainya pendekatan yang komprehensif serta menyentuh seluruh dimensi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

6. *Sumber Daya Manusia Pengelola Hutan masih terbatas, secara kuantitas jumlah polisi hutan, juru ukur, teknisi dan penyuluh kehutanan sangat terbatas, dan secara kualitas keterampilan dan kemampuannya harus ditingkatkan.*
7. *Perubahan Iklim, Isu perubahan iklim saat ini sangat penting dimana Provinsi Jambi adalah termasuk daerah rawan bencana yang di timbulkan oleh alam misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.*

Langkah strategis yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan : melalui pembentukan Tim Terpadu dengan melibatkan multipihak (adat, tomas, polri, TNI, Instansi terkait), sosialisasi / penyebarluasan hasil tata batas kawasan hutan melalui pendampingan/ penyuluhan.
2. Percepatan Pembangunan HTR, HD dan kemitraan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan.
3. Kampanye menanam dan pemberian bibit tanaman kehutanan disetiap even kegiatan kehutanan kepada seluruh lapisan masyarakat guna merehabilitasi kawasan hutan.
4. Patroli Terpadu (pengamanan dan menanam tanaman kehutanan) ; Peningkatan SDM Polhut, Sarpras dan pendanaan pengamanan hutan di daerah serta penyuluhan/ sosialisasi penegakan hukum
5. Meningkatkan pelayanan usaha kehutanan dan tertib peredaran hasil hutan ; Peningkatan usaha Hutan Tanaman, Hutan Alam dan Hutan Rakyat, fasilitasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.
6. Mengantisipasi dampak dari perubahan iklim sedini mungkin dengan cara memberikan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.
7. Bekerja sama dengan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kehutanan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Rehabilitasi Hutan dan peningkatan ekonomi sekitar hutan

## 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari Program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kinerja/kegiatan tersebut sebagai suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Pada tahun 2017 terdapat sejumlah kegiatan yang memberi nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2019 mencakup **16 Kegiatan** dalam **4 Program** untuk pembangunan kehutanan dan **21 Kegiatan** dalam **5 Program** untuk rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi guna mendukung **4 Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan**. Ikhtisar program dan kegiatan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

### Kebijakan 1

#### “ Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan ”

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan kegiatan terdiri dari:

1. Pembangunan KPHP, KPHL
2. Pengembangan hutan tanaman
3. Pengembangan kelompok tani usaha kehutanan dan pengembangan hutan masyarakat adat
4. Fasilitasi budidaya taaman pangan berbasis agroforestri
5. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial
6. Pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu
7. Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor kehutanan
8. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
9. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
10. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
11. Pengembangan hasil hutan non kayu
12. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit I Kerinci
13. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo.

14. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo.
15. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
18. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
19. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari.
20. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XII Muaro Jambi.
21. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
22. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Timur.
23. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di UPTD TAHURA

## Kebijakan 2

### “Perencanaan dan Pengembangan Hutan”

Program Perencanaan dan pengembangan hutan kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPHP, KPHL
2. Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan
3. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
4. Pemantapan dan Evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
5. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit I Kerinci
6. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
7. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
8. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
9. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
10. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
11. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
12. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
13. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
14. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
15. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
16. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD TAHURA
17. Pengelolaan hutan kenali

### Kebijakan 3

## “Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam”

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
2. Monitoring sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kebakaran
3. Pengamanan hutan
4. Pengamanan batas kawasan hutan
5. Koordinasi penegakkan hukum dalam rangka pemangilan saksi/tersangka/ahli serta pengurusan ijin sita pengadilan Kabupaten/Kota
6. Bimbingan teknis penggunaan senjata api
7. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
8. Pemantapan kawasan hutan
9. Evaluasi ijin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
10. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan
11. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati
12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit I Kerinci
13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
14. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
15. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
16. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
17. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
18. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIII Tanjung Jabung Timur
21. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIV, XV dan XVI Tanjung

### Kebijakan 4

## “Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
2. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
3. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
4. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
6. Monitoring pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

7. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Tahura
8. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Unit I Kerinci
9. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Unit II dan III Bungo
10. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Unit IV,V dan VI Merangin
11. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Unit VII Hulu sarolangun
12. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Unit VIII Hilir Sarolangun
13. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Unit IX Tebo Barat
14. Rehabilitasi Kawasan hutan di UPTD Unit X Tebo Timur
15. Rehabilitasi Kawasa hutan di UPTD Unit XI dan XII Batanghari
16. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD Unit XIII Muaro Jambi
17. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD Unit XIV Tanjung Jabung Timur
18. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat

### **3. Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019**

Pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **I. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :**

1. Pembangunan KPHP, KPHL di 11 KPHP
  - Peningkatan pembangunan KPHL/KPHP di 11 Unit
  - Peningkatan SDM teknis Kehutanan yang berkualitas sebanyak 100 orang
2. Pengembangan hutan tanaman
  - IUPHHK yang dimonitor 2 HPH, 2 RE dan 18 HTI.
  - 3 laporan HPH, RE dan HTI
3. Pengembangan kelompok tani usaha kehutanan dan pengembangan hutan masyarakat adat
  - Kelompok tani hutan yang dibina sebanyak 44 kelompok
  - Lokasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dibentuk sebanyak 11 lokasi
  - Hutan adat yang difasilitasi sebanyak 22 hutan adat
4. Fasilitasi budidaya tanaman pangan berbasis Agroforestry
  - Pelaksanaan agroforestry, Silvo Pasture dan Silvo Fishery di Provinsi Jambi
5. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial
  - 15 izin kelompok yang didampingi/fasilitasi untuk tata batas HD, HTR, HKm dan Hutan Adat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
  - 8 izin Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diterbitkan
  - 11 laporan pengawasan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
  - Penyediaan bibit tanaman kehutanan dan MPTS sebanyak 110.000 batang
  - Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu sebesar 5 %.

6. Pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu
  - Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu sebanyak 15 Industri
  - Bantuan mesin pengolahan hasil hutan kayu kepada pelaku usaha kecil sebanyak 11 unit.
  - Bantuan mesin pengolahan hasil hutan non kayu kepada pelaku usaha kecil sebanyak 11 unit.
  - 3 jenis variasi produksi Hasil Hutan non Kayu
  - Pengembangan 2 obyek wisata, Tahura bukit sari dan taman hutan kenali
7. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor Kehutanan
  - Meningkatnya pendapatan PSDH/DR (Rp. 23.058.570.600,-)
  - Prosentase capaian peningkatan PAD sebesar 0.09 % (10.580.754.180,-)
  - Pelaksanaan Bintek PSDH/DR sebanyak 3 kali.
  - Peningkatan PAD sebesar 5 % (Taman Hutan Kenali)
  - Capaian target PNPB
8. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
  - Jumlah 11 IUPHHK HT/HA, dan Hutan Hak yang telah disertifikasi
  - Jumlah 11 Pemegang Ijin HT/HA, Industri dan Hutan Hak yang telah menggunakan aplikasi Online
  - Jumlah 9 kasus penegakan hukum yang diselesaikan
9. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
  - Jumlah sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat pelaku usaha mengenai pemanfaatan kayu rakyat sebanyak 22 kali.
  - Jumlah industri yang dimonitoring sebanyak 15 IUPHHK
10. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan
  - Jumlah pemegang ijin yang mendapatkan sertifikasi PHPL sebanyak 7 industri
  - Jumlah pengawasan dan pengendalian pada pemegang IUPHHK sebanyak 22 kali

11. Pengembangan Hasil hutan non kayu
  - Data wilayah yang memiliki potensi hasil hutan non kayu di 4 KPHP.
  - umlah persemaian HHBK, 5 persemaian
  - Jumlah persemaian dan penangkaran jenis anggrek alam sebanyak 5 jenis
  - Presentase realisasi sentra hasil hutan non kayu sebesar 80 %.
12. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit I Kerinci
  - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBK da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
13. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
  - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBK da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
14. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
  - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBK da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
15. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VI Hulu Sarolangun
  - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali

- Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
18. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
19. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
- Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
-

20. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
  - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan
21. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV,XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  - Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu 2 unit
  - Alat ekonomi Produktif 1 unit
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP da PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 kemitraan

## **II. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :**

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL
  - Jumlah peta geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan sebanyak 12 peta.
  - Dokumen rencana kehutanan tingkat KPHP dan UPTD Tahura sebanyak 12 dokumen
2. Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan
  - Jumlah dokumen alih fungsi lahan dan inventarisasi areal hutan sebanyak 11 dokumen
3. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan di dinas Kehutanan
  - Mengikuti pameran di luar provinsi 1 kali dan didalam provinsi 3 kali
4. Pemantapan dan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
  - Jumlah laporan RADGRK 1 dokumen

5. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit I Kerinci
    - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
    - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
    - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
    - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
  6. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit II dan III Bungo
    - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
    - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
    - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
    - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
  7. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin
    - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
    - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
    - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
    - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
  8. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
    - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
    - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
    - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
    - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
  9. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
    - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
    - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
    - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
    - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
  10. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat
    - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
    - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
    - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
    - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
  11. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit X Tebo Timur
    - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
    - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
    - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
    - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
-

12. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
  - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
  - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
  - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
  - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
13. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
  - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
  - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
  - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
  - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
14. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur
  - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
  - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
  - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
  - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun
15. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  - Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 1.647 ha
  - Penataan batas luar dan batas blok pada wilayah KPH 277 km
  - Rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RPJP 1 tahun
  - Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 tahun

**III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :**

1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  - Patroli dan ground chek sebanyak 110 kali
  - Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 66 kali
  - Bintek pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemegang IUPHHK HA/HTI dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 33 kali
  - Pelaksanaan koordinasi.

2. Monitoring Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kebakaran
  - Monev Saprasi kebakaran hutan pada perusahaan 33 kali
  - Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 11 Kelompok
  - Pengadaan alat kebakaran 2 Unit
3. Pengamanan hutan
  - Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan dan koordinasi pengamanan hutan sebanyak 55 kali
  - Rapat dan koordinasi
4. Pengamanan batas kawasan hutan
  - Patroli pengamanan batas kawasan sebanyak 66 kali
5. Koordinasi penegakkan hukum dalama rangka pemanggilan saksi/tersangka/ahli serta pengurusan ijin sita pengadilan kabupaten/kota
  - Koordinasi proses penegakkan hukum sebanyak 50 kali
6. Bimbingan teknis penggunaan senjata api
  - Pelatihan menembak dan pengawasan senjata api sebanyak 5 kali
7. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan sebanyak 66 kali
8. Pemantapan kawasan hutan
  - Sosialisasi tata batas kawasan hutan di 22 kecamatan
  - Jarak orientasi batas kawasan hutan sepanjang 60 km
  - Jarak rekontruksi batas kawasan hutan sepanjang 50 Km
  - Jarak Pemeliharaan rintis batas dan pal batas sepanjang 50 Km
9. Evaluasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan
  - Jumlah IPPKH yang dievaluasi sebanyak 11 IUPHHK
10. Fasilitasi Konflik dalam kawasan hutan
  - Jumlah konflik yang diselesaikan sebanyak 11 konflik
11. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keaneka ragaman hayati di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
  - Jumlah identifikasi kawasan esensial sebanyak 33 kali
12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit I Kerinci
  - Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin

- Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit II dan III Bungo
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
14. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
15. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
16. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun

- Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
17. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
18. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit X Tebo Timur
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
-

- Patroli pengmanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
21. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengmanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun
22. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Patroli pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Jambi 1 tahun.
  - Patroli pengmanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penyuluhan 9 orang
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
  - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan 1 tahun

#### **IV. Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

1. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan.
  - Koordinasi dan pengawasan sebanyak 33 kali
2. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
  - Pembibitan tanaman kehutanan sebanyak 110.000 batang

3. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
  - Penanaman seluas 250 ha di 11 KPHP
  - Penanaman seluas 30 Ha di UPTD Tahura
4. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
  - Pemeliharaan tanaman di Tahura orang kayo hitam dan bukit sari
  - Jumlah fasilitas yang dibangun di taman hutan kenali sebanyak 4 unit.
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
  - Luas pemeliharaan arboreteum, TUL dan Hutan Adat seluas 220 ha
6. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
  - Jumlah dokumen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 11 Dokumen
7. Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD Tahura
  - Luas Penanaman seluas 300 ha
  - Luas pemeliharaan tanaman seluas 575 ha
8. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit I Kerinci
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
9. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
10. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
11. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
12. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha

13. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
14. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
15. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
16. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
17. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha
18. Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 10.000 bibit
  - Penanaman pohon pada kawasan hutan 10 ha
  - Pemeliharaan tahun pertama pada kawasan hutan 5 ha

#### **V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Operasional rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
14. Operasional rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
15. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetak dan pengadaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

16. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
    - Penyediaan jasa surat menyurat
    - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - Penyediaan alat tulis kantor
    - Penyediaan barang cetak dan pengandaan
    - Penyediaan komponen instalasialistik/penerangan bangunan kantor
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
    - Penyediaan makanan dan minuman
    - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
  17. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
    - Penyediaan jasa surat menyurat
    - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - Penyediaan alat tulis kantor
    - Penyediaan barang cetak dan pengandaan
    - Penyediaan komponen instalasialistik/penerangan bangunan kantor
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
    - Penyediaan makanan dan minuman
    - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
  18. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat
    - Penyediaan jasa surat menyurat
    - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - Penyediaan alat tulis kantor
    - Penyediaan barang cetak dan pengandaan
    - Penyediaan komponen instalasialistik/penerangan bangunan kantor
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
    - Penyediaan makanan dan minuman
    - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
  19. Operasional rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur
    - Penyediaan jasa surat menyurat
    - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - Penyediaan alat tulis kantor
-

- Penyediaan barang cetak dan pengandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

20. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetak dan pengandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

21. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetak dan pengandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

22. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetak dan pengandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

23. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetak dan pengandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

#### **VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan

#### **VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan

#### **VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
2. Peningkatan sumber daya pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset

**IX. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi ikhtisar kinerja SKPD
  - Termonitornya laporan kinerja dinas bidang keuangan
  - Target capaian 7 dokumen
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
  - Terencanaannya perencanaan yang baik dan terukur sesuai dengan program – program yang dilaksanakan oleh bidang.
  - Target Capaian 5 Dokumen Monev

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2016 - 2021 sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kinerja yang baru dan benar – benar yang tepat sasaran. Target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicantumkan dalam RPJMN Republik Indonesia dan juga Provinsi Jambi Khususnya Dinas Kehutanan berkaitan dengan Tingkat Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi terutama target capaian penurunan titik api dan peningkatan luas kawasan hutan yang tertutup pohon dan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, sehingga dengan terwujudnya target capaian tersebut visi dan misi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi dapat diwujudkan.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat diselesaikan secara arif dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* yang lebih baik dimasa mendatang.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2016-2021, maka dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan antara lain melalui ;

1. Optimalisasi kerjasama internal lingkup kehutanan dan eksternal lintas instansi,
2. Optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta jumlah maupun kemampuan/ profesionalisme SDM bagi upaya pencapaian kinerja sesuai kondisi objektif.

3. Peran serta dari pihak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan perlu ditingkatkan untuk menunjang kegiatan bidang kehutanan

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan guna mewujudkan keberhasilan visi dan misi kedepan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.